

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.2 Deni Darmawati (2003)

Penelitian oleh Deni Darmawati (2003) yang berjudul “*Corporate Governance dan Manajemen Laba: suatu studi empiris*”. Penelitian ini bertujuan menguji praktik-praktik *corporate governance* terhadap praktik manajemen laba melalui *accrual discretionary*. Mekanisme *corporate governance* yang diuji dalam penelitian ini meliputi komitmen perusahaan terhadap *corporate governance*, pelaksanaan RUPS dan perlakuan terhadap pemegang saham minoritas, kualitas dewan komisaris, kualitas dewan direksi, kualitas hubungan perusahaan dengan *stakeholders*, transparansi dan akuntabilitas, dan kepemilikan institusional. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda penelitian ini berhasil membuktikan kualitas hubungan perusahaan dengan *stakeholders* berhubungan negatif dengan manajemen laba. Sedangkan peneliti belum berhasil menemukan hubungan negatif mekanisme *corporate governance* lainnya.

2.1.3 Ujiyantho dan Pramuka (2007)

Penelitian oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007) berjudul “Mekanisme *Corporate governance*, manajemen laba dan kinerja keuangan (studi pada perusahaan *go public* sektor manufaktur)”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial,

persentase komisaris independen dan ukuran dewan direksi sedangkan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba dihitung dengan menggunakan *Modified Jones Model*. Penelitian ini mengambil 30 perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEJ periode 2001-2004. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

2.1.4 Siallagan dan Machfoedz (2006)

Penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006) berjudul “mekanisme *corporate governance*, kualitas laba dan nilai perusahaan”. Penelitian ini bertujuan menyelidiki hubungan antara *corporate governance*, terhadap kualitas laba dan dengan nilai perusahaan. Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi kepemilikan manajerial, dewan komisaris, keberadaan Komite audit dan variabel terikat *discretionary accruals* (DACC) sebagai proksi kualitas laba dihitung dengan menggunakan *Medoel Jones* yang dimodifikasi. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 74 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) selama tahun 2000-2004. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan metode *Generalized least squares* (GLS) untuk menguji dan membuktikan

hipotesis yang diajukan. Hasil penelitiannya terbukti bahwa kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh negatif terhadap terhadap *discretionary accrual*, sedangkan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *discretionary accrual*.

2.1.5 Rudi Isnanta (2008)

Penelitian ini dilakukan oleh Rudi Isnanta (2008) berjudul “Pengaruh *corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap manajemen laba dan kinerja keuangan”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dan dampak dari variabel *corporate governance* struktur kepemilikan, manajemen laba dan kinerja keuangan. Sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI 2003-2006 yang berjumlah 99 perusahaan. Pengujian dilakukan dengan program AMOS versi 6.0. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *corporate governance* dan struktur kepemilikan tidak terbukti berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan manajemen laba tidak terbukti berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan.

2.1.6 Werner R Murhadi (2008)

Penelitian ini dilakukan oleh Werner R Murhadi (2008) berjudul Studi pengaruh *good corporate governance* terhadap praktik *earning manajement* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua

perusahaan yang terdaftar di perusahaan yang terdaftar di BEI 2005-2007. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi linier berganda dengan metode OLS. Lima indikator GCG dalam penelitian ini adalah komite audit, komisaris independen, CEO duality , Top Share dan koalisi pemegang saham. Hasilnya diperoleh bahwa yang berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba hanya CEO duality dan Top Share sedangkan komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.



Tabel 2.1
Tabel Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

NO	Peneliti (tahun)	Judul	Tujuan	Metode Analisis	Hasil	Saran
1	Deni Darmawati 2003	“ <i>Corporate Governance</i> dan Manajemen Laba: suatu studi empiris”.	Untuk menguji praktik-praktik <i>Corporate Governance</i> terhadap praktik manajemen laba melalui	Analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas hubungan perusahaan dengan <i>stakeholders</i> berhubungan negatif dengan praktik manajemen laba. • Penelitian ini belum berhasil menemukan hubungan negatif pelaksanaan RUPS 	Bagi penelitian selanjutnya bisa menggunakan variabel penunjang <i>good corporate governance</i> yang lainnya.

			<i>accrual dicretionery.</i>		dan perlakuan pemegang saham minoritas, kualitas dewan komisaris, kualitas dewan direksi, transparansi, dan akuntabilitas, dan kepemilikan saham perusahaan oleh investor institusional terhadap manajemen laba.	
2	Ujiyantho dan Pramuka	Mekanisme <i>Corporate</i>	Untuk mengetahui	Analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan institusional tidak 	Penelitian selanjutnya perlu meneliti variabel

	2007	<p><i>governance</i>, manajemen laba dan kinerja keuangan (studi pada perusahaan go publik sektor manufaktur)</p>	<p>pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap manajemen laba</p>		<p>berpengaruh terhadap manajemen laba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba • Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba • Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh 	<p>lain. Misalnya komite audit yang membantu fungsi pengawasan dewan komisaris dan untuk manajemen laba perlu ditinjau dari perspektif yang lain, misalnya persektif efisiensi.</p>
--	------	--	--	--	--	---

					signifikan terhadap manajemen laba	
3	Siallagan dan Machfoedz 2006	“mekanisme <i>corporate governance</i> , kualitas laba dan nilai perusahaan”	Menyelidiki hubungan antara <i>corporate governance</i> terhadap kualitas laba dan kualitas laba dengan nilai perusahaan	Analisis regresi berganda dengan menggunakan metode Generalized least squares (GLS)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>discretionary accrual</i> • Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>discretionary accrual</i> 	Penelitian yang akan datang diharapkan meneliti dan mendapatkan teori akan peranan kualitas laba sebagai variabel pemediasi.
4	Rudi Isnanta	Pengaruh	Untuk	Analisis regresi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>corporate governance</i> 	Bagi penelitian

	2008	<i>corporate governance</i> dan struktur kepemilikan terhadap manajemen laba dan kinerja keuangan	menguji pengaruh dan dampak dari variabel <i>corporate governance</i> struktur kepemilikan, manajemen laba dan kinerja keuangan	Linier berganda dengan program AMOS versi 6.0	dan struktur kepemilikan tidak terbukti berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan • manajemen laba tidak terbukti berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan	selanjutnya bias menggunakan metode yang lain misalnya untuk <i>corporate governance</i> diukur dengan <i>indeks corporate governance</i> , begitu juga dengan manajemen laba hendaknya diukur dengan <i>discretionary accruals</i> dengan model Jones.
5	Werner R Murhadi	Studi pengaruh <i>good</i>	Untuk mengetahui	Analisis regresi linier berganda	• CEO duality dan Top Share berpengaruh	--

	2008	<p><i>corporate governance</i> terhadap praktik <i>earning management</i> pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia</p>	<p>pengaruh <i>corporate governance</i> terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan</p>	<p>dengan metode OLS</p>	<p>signifikan terhadap manajemen laba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 	
--	------	--	--	--------------------------	--	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi *Good Corporate Governance*

Komite *Cadbury* (1992) dalam Surya dan Yustiafanda (2008:4) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawabannya kepada *stakeholders*.

Organization for Economic Copertion and Development (OECD) dalam Zarkasyi (2008-35) mendefinisikan “*Corporate Governance* sebagai perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuannya *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi pihak-pihak pemegang kepentingan.

Menurut keputusan menteri badan usaha milik Negara nomor KEP 177/M-MBU/2002 dalam Surya dan Yustiavandana (2008:25) mendefinisikan “*Corporate Governance*” adalah suatu proses dari struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai –nilai etika”. Menurut Price Waterhouse Coopers dalam Surya dan Yustiavanda (2008:26)” *Corporate Governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif”. Dibangun melalui

kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*. *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur pola hubungan antara komisaris, direksi dan manajemen agar terjadi *checks and balances* dalam pengelolaan organisasi untuk mendorong terciptanya kinerja yang kompetitif dalam mencapai tujuan utama perusahaan. Dengan adanya *Corporate Governance* yang baik keputusan-keputusan penting perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan, misalnya direksi, tetapi ditetapkan setelah mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan.

2.2.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Penerapan GCG diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan konsistensi suatu perusahaan atau organisasi. Agar tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai, diperlukan prinsip-prinsip yang mendasari GCG yang diterima secara *universal*. Prinsip-prinsip GCG berikut yang dijadikan acuan oleh Negara-negara diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut Zarkasyi (2008:39) prinsip-prinsip GCG tersebut adalah sebagai berikut:

a. Transparansi (*Transparency*)

Suatu perusahaan atau organisasi dikatakan terbuka jika mampu menyediakan dan mengungkapkan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu bagi para *stakeholders*-nya. Informasi yang diungkapkan antara lain tentang kondisi keuangan

perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Keterbukaan diperlukan agar para *stakeholders* mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas membuat kewenang-wenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta tanggung jawabnya para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Hal ini diperlukan karena perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerja secara wajar dan transparan, sehingga perusahaan harus dikelola secara wajar dan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Dalam surah An Nahl :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

c. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip ini menuntut baik pimpinan dan manajer serta perusahaan secara keseluruhan melakukan kegiatan secara bertanggung jawab. Pengelolaan perusahaan selalu diusahakan untuk tidak merugikan kepentingan berbagai pihak. Untuk itu

perusahaan harus memenuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan agar terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

d. Independensi (*Independency*)

Pelaksanaan GCG akan lancar apabila perusahaan dikelola secara independen, sehingga masing-masing orang dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Menurut prinsip ini, perusahaan dituntut untuk bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku.

e. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Pemegang saham dan *stakeholders* lainnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perusahaan . Oleh karena itu, *stakeholders* yang ada harus mendapatkan perlakuan yang adil dan wajar dari perusahaan. Dengan adanya prinsip ini, adanya perbuatan-perbuatan tercela yang mungkin dilakukan oleh pihak internal perusahaan dapat dihilangkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan apabila menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Ini dijelaskan dalam surat al-An'am 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ج ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ^ط لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu)[519], dan penuhilah janji Allah[520]. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

2.2.3 Manfaat dan Tujuan *Corporate Governance*

Dewi (2009:42) menjelaskan bahwa dengan melaksanakan *Corporate Governance*, ada beberapa manfaat yang bias dipetik antara lain:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan terciptanya budaya kerja yang sehat.
- b. Meminimalkan kerugian akibat penyalahgunaan wewenang oleh direksi dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
- c. Meningkatkan kepercayaan investpr yang pada akhirnya meningkatkan *value* perusahaan.

- d. Praktik GCG menempatkan karyawan sebagai salah satu *stakeholders* yang harus dikelola dengan baik sehingga akan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.
- e. Meningkatkan citra positif perusahaan sekaligus meminimalkan *cost* akibat tuntutan *stakeholders* pada perusahaan
- Tungga dan Amin (2009:9) menjelaskan bahwa dengan melaksanakan *Corporate Governance* dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
- Perbaikan dalam komunikasi
 - Minimasi potensial benturan
 - Fokus pada strategi-strategi utama
 - Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi
 - Kesinambungan manfaat
 - Peningkatan kepuasan pelanggan
 - Perolehan kepercayaan investor
- Surat At taubah 199

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.

GCG berkaitan dalam pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika nilai sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu sistem *Corporate Governance* yang efisien, menjamin perusahaan yang dikelola untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan membantu mencapai alokasi sumber daya yang efisien. Sebaliknya, kegagalan dalam *Corporate Governance* dapat menimbulkan alokasi sumber daya yang kurang optimal, investasi yang terlalu beresiko, kecurangan yang dilakukan manajemen, financial *distress* bahkan kebangkrutan. Dijelaskan dalam Surat An Nahl 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

2.2.4 Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Konsep *Corporate Governance* di Indonesia

Ada beberapa alasan mengenai pentingnya *Corporate Governance* di Indonesia antara lain yaitu adanya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1999 di Indonesia yang berkembang menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan (Zarkasyi, 2008:89). Faktor-faktor yang menjadi pendorong munculnya krisis ini adalah beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi, seperti lemahnya *Corporate Governance*, *moral hazard*, dan hilangnya supervise dan regulasi.

Selain itu, munculnya pasar global dan munculnya tuntutan globalisasi akan mendorong para investor besar untuk mencari peluang investasi yang atraktif di luar pasar domestik. Hal ini menuntut adanya standar pelaporan yang konsisten dan menuntut perlakuan yang adil terhadap kepentingan pemegang saham. Munculnya pasar global telah meningkatkan tuntutan terhadap pelaksanaan GCG.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa memburuknya keadaan ekonomi di Indonesia disebabkan karena banyak perusahaan di Indonesia yang belum menerapkan GCG secara konsisten sebagai dasar penyelenggaraan operasi perusahaannya dan belum diterapkannya etika bisnis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang bangkrut, buruknya kinerja keuangan nasional, kredit macet, serta rendahnya daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri (Zarkasyi, 2008:90)

Krisis ekonomi yang telah terjadi tersebut membawa pengaruh penting, yaitu meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya penerapan konsep GCG

yang sekaligus menjadi isu sentral dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang stabil dimasa yang akan datang. Penerapan GCG dalam dunia usaha Indonesia merupakan tuntutan zaman agar perusahaan-perusahaan yang ada jangan sampai tertindas oleh persaingan global yang semakin keras.

2.2.5 Mekanisme *Good Corporate Governance*

1. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan faktor sentral dalam *corporate governance*. Dewan komisaris adalah pihak yang bertanggung jawab dan memiliki otoritas penuh dalam membuat keputusan tentang bagaimana melakukan pengawasan atau pengelolaan sumber daya sesuai tujuan perusahaan. Fungsi utama dewan komisaris adalah sebagai pengawas dan penasihat dalam perusahaan. Dewan komisaris menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, memonitor, dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, serta memonitor pelaksanaan *governance*. Pada kenyataannya, banyak komisaris yang masih berada dibawah kendali pemegang saham mayoritas sehingga tidak dapat melakukan fungsi kontrolnya terhadap direksi dengan baik. Oleh karena itu, praktik *corporate governance* mengharuskan adanya komisaris independen, obyektif, dan menempatkan kesetaraan sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya. Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas

dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Surya dan Yustiavandana, 2008:135)

Proporsi dewan komisaris dalam perusahaan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta bertindak secara independen. Peraturan BEJ mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEJ untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan komisaris yang dapat dipilih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat (Surya dan Yudistiavandana, 2008:135)

Kriteria komisaris independen menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesian* (FCGI) dalam Surya dan Yudistiavandana (2008:136) yaitu:

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen
2. Komisaris independen merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.
3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.

4. Komisaris independen bukan merupakan penasihat professional perusahaan dan perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris independen bukan merupakan pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
6. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun hubungan lainnya yang dapat atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

Dapat disimpulkan, komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang memang benar-benar berada pada posisi netral dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kepentingan dengan komisaris lainnya atau direksi atau pihak-pihak yang dapat mengurangi posisi independensinya. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham institusional adalah porsi saham yang dimiliki oleh badan atau lembaga di luar perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak berbentuk institusi seperti, bank, perusahaan asuransi dan perusahaan investasi (Wahidahwati, 2001 :1084).

Adanya kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi, dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Tindakan pengawasan perusahaan oleh investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* manajer.

Kepemilikan institusional efektif digunakan sebagai alat *memonitoring* manajemen (Jansen dan Meckling, 1976). Kepemilikan institusi yang menguasai saham mayoritas dapat melakukan pengawasan serta pengendalian yang lebih kuat dan efektif terhadap kebijakan manajemen. Saham institusional dalam penerapan GCG berfungsi mengarahkan dan memonitor arah kegiatan bisnis perusahaan, sebagai sumber informasi perusahaan terkait prinsip transparansi, mengajukan suara rapat pemegang saham.

Cai et al (2001) dalam Faisal (2004: 179) mengemukakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuan untuk memonitor manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional akan menggantikan peranan kepentingan manajerial dalam rangka

meminimumkan *agency kost* perusahaan sehingga dengan adanya kepemilikan oleh pihak institusional akan mampu mendorong pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajemen.

Dapat disimpulkan bahwa, kepemilikan institusional menjadi salah satu untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini karena komponen ini menempatkan dalam posisi netral, maka diharapkan mampu meredam pengaruh kepentingan yang tidak mengarah pada kepentingan bersama dalam perusahaan serta lebih bisa mengawasi kinerja manajemen. Kepemilikan institusional mampu menggantikan peranan kepemilikan manajerial dalam menselaraskan tujuan antara agen dan principal. Dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan yang lebih efektif terhadap kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan.

3. Komite Audit

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan untuk melaksanakan prinsip GCG. Komite audit ini dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting yang berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan (Surya dan Yustiavandana 2008:145)

Salah satu persyaratan untuk menerapkan prinsip GCG dalam perusahaan adalah eksistensi komite audit sebagai sub komite dari fungsi dewan komisaris dalam struktur organisasi perusahaan. Keberadaan komite audit adalah untuk

membantu pemberdayaan dewan komisaris. Oleh karena itu, pertanggung jawaban komite audit adalah kepada dewan komisaris. Anggota komite audit disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

Komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan di bidang akuntansi dan hal-hal yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan (Surya dan Yustivandana, 2008 :145). Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. Komite audit diharapkan mampu menelaah hal-hal penting mengenai pelaporan keuangan perusahaan.

Menurut Surya dan Yustivandana, 2008 :148, pada umumnya komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang yaitu :

1. Laporan keuangan

Tanggung jawab komite audit dibidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata kelola perusahaan

Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan

secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan perusahaan

Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Berdasarkan penjelasan diatas, komite audit memegang peranan penting dalam meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham. Namun, komite audit tidak akan dapat berfungsi secara efektif tanpa anggota yang kompeten, independen dan aktif. Efektivitas komite audit juga ditentukan oleh kejelasan tentang komposisi, klasifikasi tugas maupun fungsi dan tanggung jawabnya.

4. Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan agen para pemegang saham untuk memastikan perusahaan dikelola guna kepentingan perusahaan tersebut (Surya dan Yustivandana, 2006 :140). Pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS. Anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan perusahaan. Direksi sebagai organ perusahaan berwenang penuh dalam pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan.

Menurut Zarkasyi(2008 :100) masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaannya tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara.

Menurut Zarkasyi(2008 :101) menjelaskan bahwa agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut

1. Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga kemungkinan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan secara cepat serta dapat bertindak independen
2. Direksi harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
3. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.6 Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas

Untuk menyesuaikan prinsip-prinsip tentang pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), maka aspek hukum yang menegaskan peraturan tentang perseroan terbatas memiliki ruang lingkup yang menegaskan tentang prinsip-prinsip hukum dan implementasi yang tegas sehubungan dengan kedudukan dan dari para komisaris, direksi, dan para pemegang saham.

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas (UUPT) merupakan kerangka yang sangat penting bagi pengaturan penerapan prinsip GCG di Indonesia. Yang dimaksud sebagai Perseroan Terbatas UU tersebut adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwasanya PT didirikan berdasarkan perjanjian, sehingga suatu perseroan haruslah didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang mana ketentuan ini terus berlaku selama perseroan masih berdiri, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat (3) UUPT, yang mewajibkan jumlah pemegang saham dalam perseroan minimum berjumlah dua orang. Perjanjian pendirian PT tersebut haruslah dibuat dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Setelah pembuatan akta pendirian, perseroan harus melakukan beberapa tahapan lagi untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. *Pertama* adalah pengajuan permohonan kepada menteri kehakiman RI untuk memperoleh pengesahan dalam, dengan melampirkan Akta Pendirian Perseroan tersebut. *Kedua*, setelah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka menurut pasal 7 Ayat (6)

UUPT, perseroan yang didirikan memperoleh statusnya sebagai badan hukum. *Ketiga*, mendaftarkan perseroan tersebut dalam daftar perusahaan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Perseroan yang telah didaftarkan tersebut kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI yang permohonannya dilakukan oleh direksi.

Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Selain itu, kelalaian atas kewajiban pendaftaran dan pengumuman ini juga mengandung sanksi pidana sebagaimana diatur oleh UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang merupakan sumber hukum bagi ketentuan pendirian badan usaha yang berbentuk PT beserta seluruh organ dan komponen yang ada di dalam tubuh perseroan terbatas, yang terdiri dari RUPS, direksi, dan komisaris. Dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari UU tentang Wajib Daftar Perusahaan tersebut, telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 121 / DJPN / V / 1996 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran PT dalam kaitannya dengan UU No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 272/ DJPN/IX/ 1996 tanggal 20 september 1996 kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Deprtemen Perindustrian dan Perdagangan perihal Pendaftaran Perseroan Terbatas. Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Direktur Pendaftaran Perseroan Terbatas. Surat tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Direktur Pendaftaran Perusahaan Direktorat

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 206/PP-I/VII/98 tanggal 29 juli 1998 kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan perihal Pendaftaran Perseroan.

Untuk menyesuaikan implementasi prinsip-prinsip GCG, peraturan tentang PT memiliki ruang lingkup kedudukan dan tanggung jawab dari setiap organ yang ada didalam PT akan memengaruhi desain kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar.

2.2.7 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Persektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance* (Ujiyanto dan Pramuka,2007:5). Konsep *corporate governance* timbul karena adanya keterbatasan dari teori keagenan dalam mengatasi masalah keagenan dan dapat dipandang sebagai kelanjutan dari teori keagenan (Ariyoto dkk, dalam Paramita,2008:1). Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *Agent* tersebut (Jansen dan Meckling, 1976 dalam Ujiayantho dan Pramuka, 2007:2). Masalah keagenan timbul saat keinginan – keinginan atau tujuan dari *principal* atau *agent* berlawanan.

Agency theory adalah teori yang dipopulerkan oleh Jansen dan Meckling pada tahun 1976 di mana dasar dari teori ini adalah hubungan antara *principal* atau *agent* . *Principal* (pemilik modal) dan *agent* (manajer) merupakan dua pihak yang dikenal

dalam teori agensi. *Principal* adalah pihak yang mempunyai modal atau kekayaan, dimana kekayaan tersebut akan diserahkan kepada pihak lain (*agent*) yang akan mengelola kekayaan tersebut. Dalam sebuah perusahaan *principal* adalah pemilik modal (saham), sedangkan para manajer bertindak sebagai *agent*. *principal* memperkerjakan *agent* dengan memberikan imbalan atas kinerja dengan harapan akan bertindak sesuai dengan keinginan *principal*.

Pada kenyataannya sering kali ditemukan bahwa kepentingan antara *agent* dan *principal* berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya preferensi tujuan kerja dan risiko yang berbeda dari *agent* dan *principal*. Dari preferensi tujuan kerja, perbedaan atas dasar asumsi bahwa semua individu adalah egois. Pemegang saham hanya tertarik pada tingginya laba, sementara agen lebih fokus pada kompensasi keuangan yang diterima dari *principal*. Sedangkan dari preferensi risiko perbedaan didasarkan atas asumsi bahwa manusia lebih menginginkan keuntungan dari pada kerugian. Para agen lebih cenderung menghindari risiko, sementara *principal* memilih untuk menolak adanya risiko.

Einsenhardt (1989) dalam Ujianto dan Pramuka (2007:3) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

- a. *Self interest* : manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri.
- b. *Bounded Rationality* : manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang.
- c. *Risk averse* : manusia selalu menghindari resiko.

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. Hal tersebut bertentangan dengan kepentingan pemegang saham yang menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Manajer perusahaan bisa saja bertindak untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, tetapi tujuannya untuk memenuhi kemakmuran individu, keselamatan kerja, gaya hidup, dan keuntungan yang lain seperti kantor yang mewah, mobil serta fasilitas lainnya yang dibebankan kepada biaya perusahaan. Perbedaan ini akan menimbulkan masalah antara manajer dengan pemegang saham yang disebut masalah agensi (*agency problem*).

2.1.8 Agency Problem

Menurut Darmawati (2006 :69) masalah keagenan atau *agency problem* disebabkan oleh dua hal. Pertama, adalah masalah keagenan yang timbul pada saat keinginan-keinginan atau tujuan dari *principal* dan *agent* berlawanan serta merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi *principal* untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. kedua, masalah pembagian resiko yang timbul pada saat *principal* dan agen mungkin memiliki preferensi terhadap resiko. Konflik kepentingan bahwa *agent* tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* dapat menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*),

Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi *agency cost* yang diungkapkan oleh Putri dan Natsir (2006:2) yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepemilikan dari dalam (*Insider Ownership*) atau kepemilikan manajerial, menurut Jasen dan Meckling (1976:5) penambahan kepemilikan manajerial memiliki keuntungan untuk mensejajarkan kepentingan manajer dengan pemegang saham
- b. Menggunakan kebijakan hutang. Pemegang saham akan melakukan monitoring terhadap manajemen namun bila biaya *monitoring* tersebut terlalu tinggi maka mereka akan melakukan pihak ketiga (*debitholders* dan *bondholders*) untuk membantu mereka melakukan monitoring. *Debitholders* yang sudah menambahkan dananya diperusahaan dengan sendirinya akan berusaha melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut.
- c. Peningkatan *Deviden Payout Ratio* (DPR), atau rasio deviden terhadap laba bersih. Pembayaran deviden akan menjadi alat monitoring bagi manajemen.
- d. Mengaktifkan monitoring melalui investor – inverteor institusional. Adanya kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kekuasaan manajemen.

2.2.9 Asimetri Informasi (*Asymetric Information*)

Sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik (Ujiyanto dan Pramuka, 2007:2).

Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Situasi ini akan memicu munculnya satu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymetry*), yaitu suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan *stakeholders* pada umumnya sebagai pengguna informasi.

Menurut Scoot (2003:380), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

- a. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer perusahaan serta orang-orang dalam lainnya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor sebagai pihak luar perusahaan. Jadi *adverse selection* merupakan asimetri informasi yang berkaitan dengan masalah komunikasi dari pihak manajemen kepada pihak luar atau investor dengan keakuratan *disclosure* yang dilakukan manajer mengenai prospek perusahaan, ketidakyakinan pemegang saham dengan kualitas manajemen dan lain-lain.
- b. *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Adanya kesenjangan informasi membuat manajer cenderung menjadi pihak yang lebih superior dalam menguasai informasi dibandingkan pihak lain. Kesenjangan informasi atau asimetri informasi baik dengan *adverse selection* atau *moral hazard* yang dilakukan antara manajer dengan pihak lain ini akan mendorong pihak manajemen untuk berperilaku *opportunistic*. Hal inilah yang mengakibatkan manajer hanya akan mengungkapkan suatu informasi tertentu jika ada manfaat yang diperolehnya.

2.2.10 Definisi Manajemen Laba

Menurut Healy & Wahlen (1999) dalam Mudianty & Machfoedsz (2003: 576) menyatakan bahwa “manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan transaksi untuk mengubah laporan keuangan sebagai dasar kinerja perusahaan yang bertujuan menyesatkan pemilik atau pemegang saham”. Menurut Schipper (1989) dalam Subramayam (2000:120), manajemen laba adalah intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba untuk memenuhi tujuan pribadi.

Scott (2000) dalam Isnanta (2008:15) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi 2. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak hutang dan *political cost*. Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting (efficient earnings management)*, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan

perusahaan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham dalam perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat peralatan laba (income smoothing) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu. Dijelaskan dalam surat Al Furqon 72

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

Artinya: *dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.*

Menurut Setiawati dan Naim (2000:424) “ manajemen laba adalah campuran manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Menurut Belkai (2006:201) manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.

Dari berbagai macam definisi manajemen laba, pada dasarnya definisi tersebut berkaitan dengan tindakan intervensi manajer terhadap proses penyusunan laporan keuangan untuk menaikkan atau menurunkan laba, termasuk dalam proses penyusunan transaksi, sehingga perlakuan akuntansi yang diharapkan oleh manajer dapat digunakan. Definisi-definisi tersebut menggambarkan manajemen laba sebagai suatu tindakan oportunitis manajer sehingga dapat *manage earnings* pada tingkat yang diinginkan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu dengan cara tertentu pula.

2.2.11 Pemicu Manajemen Laba

Selain teori agensi, perilaku manajemen laba juga dapat dijelaskan melalui *Positive Accounting Theory* (PAT). Tiga hipotesis PAT yang dijadikan dasar pemahaman tindakan manajemen laba yang dirumuskan oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam Halim (2005:119), antara lain:

1. *Bonus Plan Hypotesis*, manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya, yaitu mendapatkan bonus yang tinggi. Dengan demikian manajer akan cenderung berperilaku oportunitis dengan memilih untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba dengan harapan untuk meningkatkan bonus mereka.
2. *Debt Covenant Hypotesis*, manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak peningkatan laba. Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal. Perusahaan dengan *Rasio Debt to equity* yang tinggi akan berakibat menimbulkan kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor dan bahkan perusahaan dapat terancam melanggar perjanjian hutang. Semakin dekat perusahaan pada pelanggaran terhadap persyaratan kredit, maka semakin besar kecenderungan manajer melakukan praktik manajemen laba.
3. *Political Cot Hypotesis*, semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang dapat

menurunkan laba. Hal tersebut dikarenakan dengan laba yang tinggi maka biaya politik juga semakin tinggi, misalnya biaya pengenaan pajak dari pemerintah. Dijelaskan dalam surat Al isro'

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ

أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٦٦﴾

Artinya: *dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.*

2.2.12 Faktor-Faktor Pendorong Manajemen Laba.

Scout (2000: 302) dalam Isnanta (2008:22) mengemukakan adanya beberapa motivasi yang menyebabkan adanya manajemen laba:

1. *Bonus purposes*

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara *opportunistic* untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini (healy, 1985)

2. *Political motivations*

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan-peraturan yang lebih ketat.

3. *Taxation motivations*

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.

4. Pergantian CEO

CEO yang mendekati masa pension akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diperhentikan.

5. *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki nilai pasar dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan manajemen laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

6. Pentingnya member informasi kepada investor

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

2.2.13 Bentuk dan Motivasi Manajemen Laba

Subramayam (2005:121) mengemukakan bentuk –bentuk manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajer antara lain :

- a. *Taking a bath*, yaitu dengan melaporkan kerugian yang besar sekaligus jika perusahaan berada dalam keadaan buruk atau kemunduran kinerja yang tidak menguntungkan dan tidak dapat dihindari pada periode berjalan. Dengan cara ini diharapkan perusahaan dapat menciptakan peluang laba yang besar dimasa yang akan datang.
- b. *Income minimization*, yaitu penurunan tingkat laba yang diperoleh perusahaan. Bentuk manajemen laba saat ini dilakukan pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan untuk mengurangi biaya politik.
- c. *Income maximization*, yaitu upaya perusahaan untuk memaksimalkan tingkat laba yang diperoleh melalui pemilihan metode-metode akuntansi dan pemilihan pengakuan waktu transaksi seperti, mempercepat pencatatan dan menunda biaya. Upaya ini dilakukan agar manajemen mendapatkan bonus yang lebih besar dan juga pada saat perusahaan mendekati suatu pelanggaran kontrak hutang.
- d. *Income smooting*, melakukan bentuk manajemen laba yang sering dilakukan oleh pihak manajer. Manajer dapat menaikkan atau menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak beresiko tinggi.

Adapun motivasi dilakukan perusahaan dalam melakukan manajemen laba menurut Scoot (2000:302-306) antara lain :

- a. Kontrak bonus, pada saat ini insentif manajer didasarkan pada kinerja perusahaan, manajer akan cenderung untuk mengutamakan kepentingan mereka dalam penampilan kinerja yang lebih baik melalui manajemen laba. Hal ini sejalan dengan bonus *plan hypothesis* dalam teori akuntansi positif, dimana manajer yang bekerja di perusahaan dengan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkannya agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterima.
- b. Kontrak hutang, sejalan dengan *debt covenant hypothesis*, manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba perusahaan jika perusahaan semakin dekat dengan pelanggaran perjanjian hutang. Manajemen laba dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak.
- c. Faktor politik, kebanyakan perusahaan akan melakukan manajemen laba dalam bentuk penurunan laba untuk mengurangi biaya politis, utamanya pada saat laba yang diperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah, seperti subsidi serta berkaitan dengan berbagai peraturan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Faktor pajak, motivasi perpajakan merupakan salah satu alasan utama manajer melakukan manajemen laba. Manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menghasilkan laba yang lebih rendah, karena semakin rendah laba yang dilaporkan ke perusahaan, maka beban pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah juga dapat diminimalkan.

- e. Pergantian *Chief Executif Office* (CEO), *bonus plan hypothesis* memprediksikan bahwa seorang CEO yang mendekati pension atau habis masa jabatannya akan cenderung melakukan strategi *income mazimization* untuk meningkatkan bonus yang akan mereka terima. CEO yang kinerjanya kurang bagus juga cenderung memaksimalkan laba perusahaan untuk mencegah atau membatalkan pemecatannya.
- f. Penawaran saham perdana, manajemen laba yang dilakukan pada saat IPO bertujuan untuk mempengaruhi persepsi pihak eksternal atas nilai perusahaan. Pada saat perusahaan *go public*, informasi keuangan yang terdapat dalam prospektus merupakan sumber informasi penting bagi calon investor. Oleh karena itu, perusahaan akan menampilkan kinerja yang baik dengan menaikkan laba untuk menaikkan investor.

2.2.14 Teknik dalam Manajemen Laba

Teknik yang digunakan dalam merekayasa laba menurut Setiawati dan Naim dalam Rahmawati dkk (2007:6) dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi seperti merubah metode depresiasi aktiva tetap. Mengubah metode depresiasi angka tahun ke metode garis lurus.

b. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen untuk mempengaruhi laba melalui *judgement* terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud dan estimasi biaya garansi.

c. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Manajemen laba dapat dilakukan dengan rekayasa periode biaya atau pendapatan, misalnya : memperoleh atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai. Dijelaskan dalam surat Al baqoroh 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ ۚ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ
 لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا

شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَى ^ج وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ^ج وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ^ع ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ
 وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ^ظ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ^ج وَلَا يُضَارَّ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ ^ظ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ^ط
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ^ظ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ^ط

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Terdapat kontroversi tentang diperbolehkan atau tidaknya praktik manajemen laba. Tindakan manajemen laba diperbolehkan apabila tindakan tersebut tidak menyalahi peraturan yang ada berlaku umum, yaitu masih dalam batasan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). Sedangkan disisi lain manajemen laba tidak diperbolehkan atau merupakan perilaku yang tidak dapat diterima, alasannya karena manajemen laba merupakan pengurangan dalam keandalan informasi laporan keuangan investor tidak diterima informasi yang akurat dalam laporan keuangan tersebut.

2.2.15 Kondisi Untuk Praktik Manajemen Laba

Trueman dan Titman (1988) dalam Isnanta (2008 :24) berpendapat bahwa hanya manajer yang dapat mengobservasi laba ekonomi perusahaan untuk setiap periode. Sebaliknya, pihak lain mungkin dapat menarik kesimpulan mengenai laba ekonomi dari laba yang dilaporkan oleh perusahaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh manajer. Dalam menyiapkan laporan mungkin manajer dapat memindah, antar periode, pada saat sebagian laba ekonomi diketahui sebagai laba akuntansi dalam

laporan keuangan. Perpindahan tersebut dapat dicapai, sebagai contoh, melalui pengakuan biaya perusahaan biaya pensiun. Penyesuaian penaksiran umur ekonomis perusahaan dan penyesuaian penghapusan piutang, jika manajer tidak dapat memindah laba antar periode maka laba yang dilaporkan oleh perusahaan akan sama dengan laba ekonomi pada setiap periode. Fleksibilitas untuk menunda laba antar periode hanya tersedia bagi beberapa perusahaan, dan hanya manajer yang mengetahui apakah mereka mempunyai fleksibilitas tersebut atau tidak.

Richardson (1998) dalam Isnanta (2008 : 24) menunjukkan bukti hubungan antara ketidakseimbangan informasi dengan manajemen laba. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa tingkat ketidakseimbangan informasi akan mempengaruhi tingkat manajemen laba yang dilakukan manajer perusahaan. Hasil penelitian Richardson menunjukkan adanya hubungan yang positif signifikan antara ukuran ketidakseimbangan informasi dan manajemen laba setelah mengendalikan faktor lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba, seperti variabilitas aliran kas, ukuran, risiko, dan pengungkapan keuangan perusahaan.

2.2.16 Definisi *Corporate Governance Perception Index* (CGPI)

CGPI merupakan upaya pendekatan yang dilakukan IICG dalam menelaah praktik implementasi *corporate governance* , sebagai sebuah proses panjang yang memerlukan konsistensi, keteraturan dan komitmen seluruh *stakeholders* dan manajemen perusahaan dalam mewujudkan GCG menuju keseimbangan eksistensi

perusahaan . CGPI diikuti oleh perusahaan publik (emiten), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya.

CGPI diselenggarakan oleh IICG sebagai lembaga swadaya masyarakat independen bekerjasama dengan Majalah SWA sebagai mitra media publikasi.

Program ini dirancang untuk memacu perusahaan dalam meningkatkan kualitas penerapan konsep *corporate governance* melalui perbaikan yang berkesinambungan dengan melaksanakan evaluasi dan melakukan stadi banding (*benchmarking*)

Program CGPI akan memberikan apresiasi dan pengakuan kepada perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* melalui CGPI dan penobatan sebagai perusahaan terpercaya. Penghargaan CGPI *Award* dan hasilnya dipaparkan di Majalah SWA dalam sajian utama.

(<http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ary%20wirajaya%20final.pdf>)

2.2.17 Tujuan dan Manfaat Mengikuti *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*

Program riset dan pemeringkatan CGPI mempunyai tujuan yaitu, upaya untuk mewujudkan visi IICG menjadi lembaga independen dan bermartabat untuk mendorong terciptanya perilaku bisnis yang sehat, upaya untuk memotivasi dunia bisnis untuk melaksanakan konsep *corporate governance* dan menumbuhkan partisipasi masyarakat luas secara bersama-sama aktif dalam mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik. (<http://www.iicg.org/asset/doc/cgpi/LaporanCGPI2005.pdf>)

Program CGPI dirancang untuk mendorong perusahaan dalam meningkatkan kualitas penerapan *corporate governance* melalui perbaikan yang berkesinambungan dengan melaksanakan evaluasi dan studi banding. Dengan mengikuti CGPI, perusahaan akan memperoleh citra yang baik dimata masyarakat sehingga kepercayaan investor dan publik akan meningkat terhadap perusahaan karena adanya hasil publikasi IICG tentang pelaksanaan konsep tata kelola perusahaan secara baik yang dilakukan perusahaan tersebut. Dengan mengikuti IICG hal tersebut akan mendorong akan mendorong terciptanya dunia usaha Indonesia yang terpercaya, etis dan bermanfaat. IICG melalui program CGPI membantu perusahaan meninjau ulang pelaksanaan *corporate governance* yang telah dilakukannya dan membandingkan pelaksanaannya terhadap perusahaan-perusahaan lain pada sektor yang sama.

Hasil tinjauan dan perbandingan ini akan memberikan manfaat berikut kepada perusahaan (http://www.iicg.org/asset/doc/cgpi/Laporan_GCGPI2005.pdf):

- a. Perusahaan dapat membenahi faktor-faktor internal organisasinya yang belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya GCG berdasarkan hasil temuan selama *survey* CGPI berlangsung.
- b. Kepercayaan investor dan publik meningkat terhadap perusahaan konsep GCG yang dilakukan perusahaan.
- c. Peningkatan kesadaran bersama dikalangan internal perusahaan dan *stakeholders* terhadap pentingnya GCG dan pengelolaan perusahaan ke arah pertumbuhan yang berkelanjutan.

- d. Pemetaan masalah- masalah strategis yang terjadi di perusahaan dalam penerapan GCG sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan yang diperlukan. CGPI dapat dijadikan sebagai indikator atau standar mutu yang ingin dicapai perusahaan dalam bentuk pengakuan dari masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG.
- e. Perwujudan komitmen dan tanggung jawab bersama serta upaya yang mendorong seluruh anggota organisasi perusahaan untuk menerapkan GCG.

2.2.18 Cakupan Penilaian CGPI

Untuk melahirkan index penerapan GCG, tim kerja IICG mendasarkan penilaian pada enam kriteria antara lain :

(http://www.iicg.org/asset/doc/cgpi/Laporan_GCGPI2005.pdf):

- a. **Komitmen Perseroan terhadap Implementasi GCG**

Komitmen perseroan terhadap implementasi GCG merupakan wujud nyata kebutuhan dan keinginan organ perusahaan untuk menjalankan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dengan membentuk fungsi-fungsi khusus, merancang program, mengalokasikan anggaran , memantau pelaksanaan program, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program, serta memperbaharui penerapan tata kelola korporasi yang baik.

b. Hak Pemegang Saham dan Kepemilikan Kunci

Hak pemegang saham dan kepemilikan kunci adalah kunci sistem GCG yang dapat melindungi dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak pemegang saham.

c. Perlakuan yang Setara terhadap Seluruh Pemegang Saham

Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham adalah sistem GCG yang dapat menjamin adanya perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing.

d. Peran *stakeholders* dalam Tata Kelola Perusahaan

Peran *stakeholders* adalah tata kelola sistem GCG yang dapat mengakui hak-hak para *stakeholders* yang telah ditetapkan oleh hukum atau yang melalui perjanjian kerjasama, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dan *stakeholders* dalam penciptaan kesejahteraan, lapangan kerja, kondisi keuangan perusahaan yang sehat serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan.

e. Pengungkapan dan Transparansi

Pengungkapan dan transparansi adalah sistem GCG yang dapat menjamin terlaksananya kelengkapan pengungkapan dengan tepat waktu dan akurat atas semua informasi material yang berkaitan dengan perusahaan.

f. Tanggung Jawab Dewan Komisari dan Dewan Direksi

Tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi adalah sistem GCG yang dapat menjamin pelaksanaan tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi terhadap pengelolaan perusahaan.

2.3 Hipotesis Penelitian

1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Variabel Bebas Secara Bersama-Sama Terhadap Variabel Terikat (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel- variabel bebas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan. Untuk melakukan pengujian tersebut maka sebelumnya dilakukan pembuktian hipotesisi. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

H_0 = Proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran dewan direksi secara simultan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba

H_a = Proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran dewan direksi secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

